

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
OTONOMI DAERAH DI BIDANG KELAUTAN	18B01224602	2	Hukum Keagrariaan	II
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset dan Inovasi	
	Tanda Tangan		Tanda Tangan	
	DR. Sudirman Saad, S.H., M.H.		Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan			
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa			
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif			
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;			
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum			
KK3	Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis, berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan			

KK5	Mampu mengintegrasikan dokumen-dokumen hukum dalam merancang peraturan dan kebijakan
P1	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hukum
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta mata kuliah dapat memahami pengaturan hukum, teori dan prinsip-prinsip hukum dalam pengelolaan laut, Sumber daya Kelautan Nasional, mengetahui kewenangan, peran dan kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDKL, mampu memahami arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDKL ydi bidang kelautan secara berkelanjutan dan peserta mata kuliah dapat mampu memecahkan penyelesaian persoalan hukum pada otonomi daerah di bidang kelautan.	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
Mata Kuliah ini membahas dan mengkaji tentang otonomi daerah di bidang kelautan, membahas tentang kewenangan, peran dan kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan (SDKL), membahas pembagian kewenangan diantara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengurusan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau terkecil. Selain itu mata kuliah ini membahas tentang sejarah perkembangan pemanfaatan SDKL hingga saat ini, perkembangan pemanfaatan SDKL di wilayah Internasional, arah kebijakan pemerintah di bidang kelautan, mengkaji tentang perlindungan SDKL berkelanjutan, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan di bidang kelautan. Membahas tentang Penataan Ruang dan Wilayah serta Potensi pengembangan wilayah Kelautan dan penegakan hukumnya.	

Daftar Referensi:

1. Byatt, A. Fothergill and M. Holmes, *The Blue Planet: A Natural History of the Oceans*, BBC Worlwide Ltd, London, 2001.
2. A.S.S. Sosrokoesoemo, *Pengaturan dan Kelembagaan Pengusahaan Pertambangan di Perairan Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional V, diselenggarakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, Maret 1990.
3. Arif Satria dkk, *Menuju Desentralisasi Kelautan*, diterbitkan atas kerjasama Pusat Kajian Agraria – IPB, Partnership for Governance Reform in Indonesia, dan PT Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2002.
4. Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Penerbit Cidesindo, Jakarta, 2002, hal. 87.
5. A Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 161.

6. Ary Wahyono dkk., Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia, Penerbit Media Pressindo, 2000.
7. Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
8. Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Ind.Hill Co., Jakarta, 1992.
9. Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1999.
10. Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2001.
11. Chua Thia Eng and Nancy Bermas (eds.), Challenges and Opportunities in Managing Pollution in the East Asian Seas, GEF/UNDP/IMO Regional Program for the Prevention of MPP-EAS dan PEMSEA, Quezon City, Philippines, 1999.
12. Daniel S. Lev, —Hukum Dalam Masyarakat-masyarakat yang Sedang Berubah—, Hukum dan Keadilan, Nomor 2 tahun ke-II, September Desember 1971.
13. Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Dieter Helm (ed.), Economic Policy Towards the Environment, Blackwell Publishers, Oxford – UK, 1991.
14. Dino Patti Djalal, The Geopolitic of Indonesia's Maritime Territorial Policy, CSIS, Jakarta, 1996.
15. Edgar Gold, Maritime Transport, the Evolution of International Marine Policy and Shipping Law, Lexington Books DC Heath and Company, Lexington, Massachusetts, Toronto, 1981.
16. Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
17. Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1979.
18. Hasjim Jalal, Beberapa Perkembangan Hukum Laut Internasional, Suara Pembaruan, 29 September 1994.
19. H. Syauckani, HR. Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyif, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, penerbit Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Jakarta, 2003.
20. H. Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
21. Joseph Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Rajawali Pers, Cetakan Kelima, Jakarta, April 2001.

22. J. Stone, *Social Dimension of Law and Justice*, Stanford University Press, 1966.
23. Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
24. Lon Fuller, *The Morality Of Law*, Penguin Books, Middlesex, 1969.
25. L. M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 1995.
26. Maria S.W. Sumardjono, *Transitional Justice Atas Sumber Daya Alam*, makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional VI Hak Asasi Manusia, Surabaya, November 2000.
27. Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
28. Mark Tebbit, *Philosophy of Law*, Reutledge, London, 2000.
29. Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986.
30. Mochtar Kusumaatmadja, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Dilihat dari Sudut Hukum Internasional dan Nasional*, diterbitkan oleh Pusat Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
31. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, BPHN - Binacipta, Bandung, 1979
32. Mochtar Kusumaatmadja, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini*, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Penerbit Binacipta, Bandung, 1975.
33. Mochtar Kusumaatmadja, —*The Concept of the Indonesian Archipelago*, Indonesian Quarterly X, No. 4. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Tulisan)*, Alumni, Bandung, 2002.
34. Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998
35. M. Rusdi Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul dan Fungsi*, Penerbit Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1997
36. Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law & Society in Transition: Towards Responsive Law* , Edisi terjemahan dalam bahasa Indonesia: *Hukum Responsif: Pilihan Di Masa Transisi*, Gramedia, Jakarta, 2003

37. Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis (The Critical Legal Studies Movement), diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM, 1999.
38. Rokhmin Dahuri, Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
39. Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, dan Sapta Putra Ginting, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
40. Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, makalah dalam Lokakarya Program Legislasi Nasional, Cisarua – Bogor, 2002.
41. Ronald Dworkin, Law's Empire, Fontana Paperbacks, London, 1986
42. Satjipto Rahardjo, —Transformasi Nilai-nilai Dalam Penemuan Hukum dan Pembentukan Hukum Nasional, Makalah Disampaikan Pada Temu Wicara Tentang Pelaksanaan Pembangunan Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang II, BPHN Departemen Kehakiman, 12-14 Juni 1995.
43. S. H. Sarundajang, Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
44. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977.
45. Supriharyono, Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
46. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
47. Soeryono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia, Jakarta: UII Press, 1983.
48. Sony Keraf, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002

49. Tridoyo Kusumastanto, Reposisi “Ocean Policy” Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Di Era Otonomi Daerah, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB - Bogor, tanggal 21 September 2002.
50. Tridoyo Kusumastanto, Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta, 2003.
51. Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius, 1982.
52. Timothy Lindsey (ed.), Indonesia Law and Society, The Federation Press, Sydney, 1999.

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran/Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Topik Kajian/Materi	Bentuk/Metode/Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup mata kuliah, mampu mendefinisikan istilah-istilah dalam otonomi di bidang kelautan	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak perkuliahan - Manajemen kelas - Penjelasan RPS Mata Kuliah Otonomi di bidang Kelautan - Pengertian, Istilah dan Ruang Lingkup - Dasar Hukum Otonomi di bidang Kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi interaktif 	2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan 	3%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyebutkan dasar-dasar hukum di bidang otomi kelautan, mampu menelaah harmonisasi dan keselarasan aturan terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Penelusuran Pustaka • Penelusuran dan telaah dasar hukum otonomi di bidang kelautan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi interaktif - Tugas mandiri - Penugasan terstruktur 	2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan - Kemampuan menganalisis dalam menjelaskan peraturan hukum di bidang kelautan ddikaitkan dengan otonomi daerah - Kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan dan menjawab sesuai dengan materi pertemuan. 	6%

3-4	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai kewenangan pemerintah dalam otonomi daerah dalam bidang kelautan dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam memecahkan persoalan hukum di bidang kelautan	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah di bidang Kelautan - Peran Negara di bidang Kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi interaktif - 	2 x 50 menit		6%
5-6	Mahasiswa mampu membeberkan dan mendiskusikan pengelolaan SDKL dan sejarah pemanfaatan SDKL dari masa lampau hingga saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan (SDKL) di Indonesia - Pengelolaan sektor Laut di Masa Hindia Belanda - Periode setelah kemerdekaan - Periode restrukturisasi & reorganisasi lembaga kelautan dalam pemerintahan orde baru dan reformasi (1966-1999) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi interaktif - Tugas mandiri - Penugasan terstruktur 	2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan - Kemampuan secara lisan tulisan menjelaskan tentang sejarah pemanfaatan SDKL dari masa pemerintahan sebelum kemerdekaan hingga saat ini 	6%
7	Mahasiswa mampu menelusuri dan memanfaatkan pengetahuan materi terkait untuk pemecahan persoalan hukum di bidang pengelolaan sumber daya kelautan saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan Pengelolaan dan pemanfaatan sektor Kelautan Nasional - Perkembangan pemanfaatan SDKL di lingkup Masyarakat Internasional (Konvensi Hukum Laut UNCLOS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi interaktif - Penugasan Terstruktur - Tugas Mandiri 	2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan - Kemampuan secara lisan dan tulisan menyatakan pendapat, hasil telaah dan analisis terkait materi perkuliahan. 	6%
8	Ujian Tengah Semester					10%
9-10	Mahasiswa mampu menelusuri dan mengaplikasikan teori dan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelusuran Teori-teori dan konsep pengelolaan SDKL 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi interaktif 	2 x 50 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan 	5%

	konsep pengelolaan SDKL dalam menyelesaikan persoalan hukum di bidang pengelolaan SDKL		- Tugas mandiri		- Kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori dan konsep dalam memberikan pemecahan masalah hukum otonomi di bidang kelautan	
11-12	Mahasiswa mampu menelusuri dan menganalisis peraturan-peraturan hukum dan kebijakan pemerintah termasuk politik hukum yang melatarbelakangi aturan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi peraturan perundang-undangan (kebijakan pemerintah) di bidang pengelolaan Sumber Daya Kelautan - Arah Kebijakan Pemerintah Di bidang Pengelolaan SDKL - Agenda Nasional Pemerintah di bidang Pengelolaan SDKL 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi interaktif - Tugas mandiri - Penugasan terstruktur 	2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan - Kemampuan mahasiswa dalam mendiskusikan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dalam pengelolaan SDKL Nasional 	6%
13-14	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur kelembagaan dalam otonomi di bidang kelautan, dan mendiskusikan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mengetahui konsep penataan wilayah dan ruang di bidang kelautan.	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur dan Kelembagaan Otonomi di bidang kelautan - Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil - Penataan Wilayah dan Ruang di bidang Kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi interaktif - Tugas mandiri 	2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran - Keaktifan - Kemampuan mahasiswa secara lisan dan tulisan menanggapi materi perkuliahan minggu ini 	6%
15	Mahasiswa mampu menerangkan dan menjelaskan penegakan hukum dalam otonomi di bidang kelautan, mengetahui bentuk	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum di bidang kelautan - Perlindungan SDKL (ekosistem dan SDA yg diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi - Tugas mandiri 	2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Keaktifan - Kehadiran - kemampuan mahasiswa secara lisan dan tulisan dalam menyampaikan penegakan hukum di bidang 	6%

	perlindungan SDKL sesuai aturan terkait,, menelaah pelaksanaan pengendalian wilayah pesisir dan laut berkelanjutan dan mampu memproyeksikan potensi pengelolaan dan pemanfaatan di bidang kelautan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Wilayah Pesisir dan Laut Berkelanjutan - Potensi Pengelolaan dan Pemanfaatan di bidang Kelautan. 			kelautan, pengendalian SDKL dalam wil. Pesisir, pulau dan laut, melihat potensi dari pengelolaa dan pemanfaatan SDKL Nasional.	
16	Ujian Akhir Semester					11%